**MEKANISME PEMBINAAN WARGA GEREJA SERTA MEMPERSIAPKAN CALON PEMIMPIN UMAT[[1]](#footnote-2)**

**Penatua Prof. Dr. Ir. John FoEh[[2]](#footnote-3)**

**1. Latar belakang**

Pembinaan Warga Gereja (PWG) sebagai bagian dari pengembangan masyarakat *(community development)* erat hubungannya dengan usaha-usaha pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan praktis dan keterampilan dasar dalam berbagai bidang pengembangan masyarakat. Dalam rangka itu diperlukan juga pengembangan keteram­pilan khusus bagi warga masyarakat termasuk kaum perempuan serta pemuda, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahtera­an keluarga mereka.

Pengembangan kehidupan berorganisasi di kalangan generasi muda dilakukan baik di lingkungan sekolah termasuk kampus maupun melalui kegiatan organi­sasi kepemudaan yang ada di dalam masyarakat. Demikian pula diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu secara produktif dan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang, sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Untuk menunjang hal ini maka pemerintah mengusahakan peningkatan fasilitas latihan keterampilan, latihan kepemimpinan, rekreasi, praktek kerja, olah raga,kesenian dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan non-formal ini diusahakan melalui kelompok-kelompok belajar dengan menggali potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Untuk ikut berperan dalam rangka pengembangan masyarakat, maka gereja –sebagai bagian dari masyarakat- terpanggil untuk terlibat secara aktif dalam pembinaan warganya melalui berbagai program yang didasarkan kepada Tri Darma Gereja (*marturia*, *koinonia* dan *diakonia*).

Pembinaan Warga Gereja, -selanjutnya disingkat PWG- adalah berbagai kegiatan pendampingan warga gereja agar tetap hidup berakar dan dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh di dalam iman, dan senantiasa bersyukur atas kelimpahan berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka, . Semua pelayanan gereja adalah pembinaan warganya agar baik selaku individu maupun selaku anggota keluarga, mereka mampu melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, PWG merupakan usaha gereja untuk mendewasakan warganya, agar melalui proses belajar dan mengalami perubahan diri yang terus menerus, mereka mau dan mampu bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat.

PWG adalah hal mutlak yang perlu dilakukan oleh gereja –terutama dalam fungsi organisasi- sebagai bentuk tanggung jawab penggembalaan terhadap umat Allah. Tidak boleh ada gereja yang tidak melakukan PWG. Gereja hanya dapat terperlihara dan bertumbuh serta membawa perubahan jika PWG dilaksanakan secara baik, benar dan konsisten.

Salah satu hal yang perlu dan penting diperhatikan dalam penyelenggaraan PWG adalah kurikulum atau materi bina yang senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat maupun gereja. Materi PWG tidak hanya membahas tentang Kerajaan Allah atau masalah kehidupan kekal saja, melainkan perlu pula membicarakan *-bagaimana kehadiran Kerajaan Allah di tengah dunia-* mampu menjawab perubahan dan dinamika persoalan manusia yang telah terjadi, sedang terjadi atau berpotensi akan terjadi. Muatan materi bina atau kurikulum PWG harus memberikan solusi spesifik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat, khususnya warga gereja. Misalnya dalam konteks masa kini, materi PWG dapat memberikan solusi terhadap persoalan kemiskinan, kerusakan alam dan lingkungan hidup, sampai kepada bahaya narkoba maupun HIV/AIDS, termasuk yang marak dan berkembang pesat saat ini yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Satu hal yang pasti adalah, masing-masing gereja atau bahkan jemaat merancang materi PWG dalam arti yang *“sempit”* bahkan tidak berkait antara satu dengan lainnya atau cenderung bersifat “parokial” dan tidak berkesinambungan. PWG sering terlalu disederhanakan sekedar melalui pelayanan mimbar (khobah mingguan), atau ibadah-ibadah rutin dan pelayanan kategorial dalam gereja. Pada hakekatnya, yang dimaksud dengan PWG di sini adalah gereja *“mengajar”* atau *“mendidik”* warganya dengan peran signifikan yang memiliki dasar teologis yang kuat guna menghadapi tantangan perubahan yang sementara dan akan terus terjadi. Di samping itu, PWG atas dasar teologis yang kuat juga harus diisi dengan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu.

Catatan awal yang penting adalah bahwa *warga gereja* yang dimaksud dalam konteks ini meliputi seluruh anggota komunitas gereja mulai dari *pendeta atau gembala jemaat, para fungsionaris pelayanan gereja seperti penatua, diaken atau syamas, pegawai gereja, sampai kepada warga jemaat berdasarkan kelompok fungsional profesional ataupun berdasarkan kategori jemaat, mulai dari kelompok anak, teruna/remaja, pemuda, persekutuan perempuan, kaum bapak sampai kepada kelompok lanjut usia*.

**2. Bagaimana memulai menyusun materi bina atau kurikulum PWG?**

Pengalaman menunjukkan bahwa hampir tidak terdapat “benang merah” antara : visi-misi, tema-tema jangka panjang maupun tema tahunan dengan “kebutuhan gereja” baik pada aras sinodal, tingkat wilayah maupun pada tingkat lokal/jemaat. Lebih dari itu, tampaknya tidak ada evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh atas semua jenis pembinaan yang telah dilaksanakan. Kelemahan lain yang tampak adalah tidak ada atau tidak jelas “tolok ukur keberhasilan” dari setiap kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan pembinaan banyak dilakukan bahkan ada yang dilakukan berulang-ulang tanpa mengetahui *“benefits maupun outcomes”* yang diperoleh.

Di lain pihak secara sinodal pun sering diprogramkan kegiatan-kegiatan yang oleh jemaat dirasakan kurang menyentuh kepentingan mereka. Akhirnya, beberapa jemaat cenderung pasif atau acuh tak acuh dalam menjalankan program sinodal, sekalipun telah diputuskan bersama dalam persidangan setingkat klasis ataupun sinode. Dalam kondisi seperti ini maka saling menyalahkan dapat saja terjadi dan untuk amannya maka masing-masing pihak bertahan pada apa yang dirasakan benar atau penting baginya. Kelemahan-kelemahan seperti ini hanya dapat diatasi jika semua pihak berada pada persepsi yang sama tentang apa yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana kerja gereja di berbagai tingkatan.

Agar supaya PWG dapat lebih terarah dan menjawab kebutuhan jemaat maupun institusi maka diperlukan adanya suatu kurikulum yang baku, -paling tidak- adanya materi bina yang disiapkan yang menjawab permasalahan, pergumulan dan kebutuhan gereja sebagai institusi maupun kebutuhan warga jemaatnya sendiri. Langkah konkrit ke arah ini dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini:

a. **Pengalaman empiris** para pendeta / gembala jemaat termasuk di dalamnya mendengarkan masukan-masukan dari para tua-tua jemaat tentang pengalaman mereka menangani jemaat dan warga jemaat baik di perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Pendeta senior yang memiliki pengalaman luas di jemaat maupun di lembaga perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam penyusunan materi-materi bina yang dibutuhkan jemaat dan warga jemaat.

b. **Kegiatan penelitian** yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan di tingkat sinodal maupun komisi-komisi atau Unit Litbang yang ada di jemaat. Dalam kegiatan ini, dapat dilakukan survey kepada jemaat ataupun fungsionaris gereja untuk melakukan identifikasi masalah yang ada di Gereja atau Jemaatnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak untuk dilaksanakan dalam menunjang terlaksananya Tri Darma Gereja. Hasil survey ini kemudian dapat di cek-silang dengan survey yang dilakukan kepada para pendeta/teolog tentang hal-hal yang menurut pandangan mereka perlu dilaksanakan dalam rangka pembinaan warga gereja. Kesamaan pandangan atau jawaban antara responden jemaat / fungsionaris gereja dan para pendeta mengindikasikan bahwa kegiatan atau saran kegiatan dimaksud adalah penting untuk dilaksanakan.

c. **Pengembangan dari berbagai tindakan pembinaan** yang sudah pernah dilaksanakan, dengan syarat bahwa hasil-hasil pembinaan sebelumnya, terevaluasi dengan baik dan diketahui manfaat atau nilai tambahnya. Evaluasi yang komprehensif sangat dibutuhkan di sini, jika tindakan Litbang akan dipakai sebagai dasar merancang materi bina berikutnya. Catatan penting adalah bahwa sumberdaya di jemaat yang bisa melakukan evaluasi serta kegiatan Litbang dengan baik adalah sangat kurang sehingga validitas metodologis maupun datanya sering kali diragukan.

d. **Kebijakan institusional yang bersifat *“top-down”*** misalnya dalam hal ajaran ataupun sistem pemerintahan gereja yang harus bersifat *“central”* agar tercipta proses PWG yang tertib dan teratur. Kegiatan *top-down* juga harus diikuti dengan Litbang yang yang teratur, termasuk upaya *“benchmarking”* dengan jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang sudah maju dalam pelaksanaan PWG.

e. **Mendengarkan suara jemaat / *“akar rumput” (bottom-up)*** yang dapat diketahui melalui proses pemanfaatan metoda *“ZOPP”* (Perencanaan yang berorientasi pada tujuan) ataupun metoda *“focused group discussion”* (FGD) dalam pertemuan dengan warga sidi jemaat untuk mendapatkan masukan mengenai pergumulan dan/atau masalah yang dihadapi jemaat/warga jemaat serta upaya-upaya pemecahan masalah yang sementara dan dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Jika cara-cara ini atau kombinasinya, dilakukan maka hal yang pasti adalah bahwa penyusunan materi bina akan sesuai dengan upaya pemecahan masalah *(problem solving)* atau pergumulan yang ingin diselesaikan jemaat atau warga jemaat. Dengan demikian maka kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan, menjadi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan *(needs)* umat/warga gereja. Persoalan berikut adalah dapat dibiayai atau tidak jika kebutuhan itu menjadi suatu rencana kerja?

**3. Langkah-langkah penyusunan materi bina warga gereja**

Seringkali dalam penyusunan rencana kerja gereja atau jemaat, para fungsionaris gereja atau mereka yang bertanggung jawab untuk itu, membuat berbagai kesalahan tanpa menyadari kekurangan dimaksud. Pikiran-pikiran bagi PWG semata-mata didasarkan kepada kemampuan berpikir atau kepentingan si penyusun rencana kerja dan bukan pada apa yang menjadi kebutuhan gereja. Ketika telah diputuskan bersama, sering sekali tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Contohnya; anggaran terbatas, minat peserta sangat rendah, jemaat tidak meresponnya, waktu yang tidak tepat atau tidak cukup, dan sebagainya. Lebih salah lagi jika menyusun materi bina didasarkan pada plafon anggaran yang tersedia dan alokasi waktu karena disesuaikan dengan kesibukan para pengurus.

Untuk itu langkah-langkah sistematis penyusunan kurikulum atau materi bina PWG harus dilakukan sebagai berikut:

1. Tentukan wujud *output* yang ingin dicapai terlebih dahulu. 2 pendekatan bisa dilakukan di sini; *pertama* ditentukan institusi penyelenggara karena ingin membentuk jati diri tersendiri, *ke dua* wujud yang disesuaikan dengan permintaan pasar *(market demand trend)*. Jika output sudah jelas maka rumuskan pula *outcomes* yang mungkin ditimbulkan. Langkah ini akan menghasilkan TUJUAN PEMBINAAN sekaligus persyaratan awal dari peserta didik atau bahan bakunya.
2. Berdasarkan pada wujud output yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembinaan tadi, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan proporsi bahan dasar, bahan utama dan bahan pelengkap yang dibutuhkan untuk mewujudkan output dimaksud. Laksana suatu bangunan yang akan dibuat maka harus ditetapkan terlebih dahulu dasar bangunan atau yang disebut dengan *muatan dasar*, seluruh kerangka utama bangunan atau *muatan inti*, dan bagian pelengkap lainnya untuk mencirikan bentuk bangunan *(muatan ciri khas)* yang dikerjakan. Kalau hal ini tidak dikerjakan maka kita sebenarnya hanya merancang *RSS (rumah sangat sederhana)* untuk dihuni oleh orang dari berbagai kalangan.
3. Atas dasar muatan dasar, muatan inti dan muatan ciri/penunjang itu maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan tingkat perubahan yang ingin dicapai lewat kegiatan pembinaan itu. *Ingat sekali lagi kita tidak sementara membangun RSS atau Rusun atau apartemen mewah yang sifatnya homogen pada kelompoknya*. Gereja melakukan perubahan *(change)* baik pada dirinya sendiri maupun terhadap warganya. Perubahan didasarkan pada *needs* yang berkembang sesuai tempat dan waktu. Untuk itu ada 3 perubahan yang harus diketahui yakni; *pertama* perubahan pengetahuan dari mana ke mana, *ke dua* perubahan keterampilan dari tidak bisa atau kurang bisa menjadi bisa serta, *ke tiga* dan ini yang paling sulit adalah perubahan sikap atau perilaku seperti apa yang diinginkan? Derajad perubahan yang diinginkan ini akan menentukan mataeri apa saja yang diperlukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dari situ akan terlihat metoda dan sarana pendukung apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tegasnya, materi bina anak dan remaja apalagi pemuda harus berbeda dalam berbagai hal karena perbedaan *needs* dari kelompok yang berbeda ini. Apalagi jika materi bina yang disusun adalah Materi Ajar Katekisasi. Dengan latar belakang peserta yang berbeda pastilah pendekatan yang digunakan akan sangat berbeda menurut tempat dan waktu. Pola *blue print* yang *diturunkan dari atas* akan menyesatkan. Berbeda jika pola pengajaran katekisasi mengikuti pola belajar Quran sampai *khatam* pada usia tertentu, atau *pola katekismus* di seminari-seminari Katolik. Ada resiko kegagalan lewat evaluasi atau ujian-ujian.
4. Rumusan dan penentuan bobot perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan suatu topik akan diajarkan berapa lama dan sampai pada taraf mana. Kalau sampai pada perubahan keterampilan maka berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bagaimana pola evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar (PBM) sudah sejalan dengan tujuan awal? Semua pertimbangan ini kemudian akan menentukan waktu total yang dibutuhkan *(jumlah jam dan hari)* untuk jenis pembinaan tertentu yang dilanjutkan dengan penjabaran ke dalam satuan-satuan acara pengajaran (SAP) yang diturunkan dari syllabus yang telah disepakati sebelumnya. Sekali lagi, paket pembinaan dan materi binanya akan berbeda berdasarkan siatuasi dan kondisi warga gerejanya. Materi dimaksud meliputi materi teologis dan non teologis.
5. Langkah selanjutnya adalah evaluasi PBM. Evaluasi akan selalu dibutuhkan dalam rangka menemukan konsep pembinaan yang paling tepat untuk kebutuhan warga gereja. Evaluasi bukan saja diarahkan kepada peserta didik atau yang mengikuti pembinaan tetapi mencakup pengajar/pembina, materi ajarnya, kurikulumnya, sarana pendukung dan lain-lain. Sebagai contoh; untuk pengajaran katekisasi sangat diperlukan evaluasi yang komprehensif karena menyangkut perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermuara pada ***pengakuan*** bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sehingga ia yang mengaku itu *harus berada dalam barisan pemberita Injil* lewat cara apa saja sesuai dengan ***talenta*** yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya.

**4. PWG sebagai inti penyusunan Rencana Kerja**

Rencana kerja yang baik adalah yang didasarkan pada evaluasi yang mantap terhadap berbagai hal. Evaluasi meliputi *“ex-ante evaluation”* dan *“ex-post evaluation”*. *Ex Ante Evaluation* menghasilkan output PROGRAM KERJA YANG MANTAP *(Efisien dan Efektif)* sedangkan *Ex Post Evaluation* adalah perbandingan antara target dan realisasi. Dalam evaluasi ini digunakan indikator keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bahan dasar untuk pemuatan Rencana Kerja berikutnya. Dasar pengesahan rencana kegiatan dan anggaran yang sudah disusun berbasis pada hal-hal sebagai berikut; anggaran (budget) yang tersedia, realisasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya (evaluasi), kemampuan mengupayakan dana jika anggaran tidak memenuhi, prioritas kegiatan menurut kepentingan jemaat, kaitan kepentingan kebersamaan antar jemaat maupun pada tataran sinodal, mendesaknya suatu kegiatan dilaksanakan karena hal-hal yang tidak bisa dihindari, dsb.

Agar suatu program PWG dapat dibuat dan dilaksanakan dengan baik maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Konsep “SMART” adalah salah satu pendekatan yang dapat dipakai.

* S (specific); tidak bermakna ganda dan jelas perbedaannya dengan kegiatan lain yang diusulkan. Contoh: senam kelompok lansia
* M (measurable); terukur secara kualitatif maupun kuantitatif, serta menggunakan indikator keberhasilan yang jelas. Contoh: gerakan “terarah” selama 30 menit per hari.
* A (action-oriented); berorientasi pada tindakan. Tindakan yang akan dilaksanakan tersurat jelas. Contoh; Olah Raga (senam kebugaran)
* R (raisonable); tindakan yang diajukan “masuk akal”. Lansia harus “bergerak” teratur di bawah bimbingan instruktur berpengalaman misalnya.
* T (time bound); terikat pada waktu. Contoh; “cukup” 15 menit per hari, tiap hari Sabtu misalnya.

Langkah ini hanya akan dapat dicapai bila tim kerja mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama dan kemudian dirumuskan dan dikerjakan bersama. Menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah, maka kegiatan yang direncanakan harus “sederhana” agar mudah dimodifikasi menurut situasi dan kondisi setempat yang dihadapi.

**5. Kegiatan PWG Berdasarkan Kategori Jemaat**

Pembinaan adalah suatu bentuk pelayanan gereja agar warganya mampu melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Melalui pembinaan yang terencana dan terus menerus, warga gereja dapat menjadi panutan dan dapat berperan aktif menyatakan kesaksiannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui talenta dan profesi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari *(Kesaksian)*. Selanjutnya warga geraja diarahkan untuk berperan aktif dalam kehidupan berjemaat *(Persekutuan)*, yang pada gilirannya warga gereja akan berperan aktif dalam pelayanan kasih *(Diakonia)* dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Pembinaan warga gereja harus dibedakan antara pembinaan kepada para pelaksana penata-layanan gereja yang dipanggil dan diutus Tuhan dalam tugas khusus untuk itu dan pembinaan bagi warga gereja agar mereka diperlengkapi menuju gereja misioner.

Pembinaan bagi para fungsinaris gereja diarahkan kepada hal-hal seperti; pendalaman materi teologis, penyiapan materi bina bagi warga jemaat, kepemimpinan gereja, penggembalaan dan kemampuan pastoral serta pendampingan, masalah manajemen gereja, lingkungan hukum, sosial, politik dan ekonomi di sekitar gereja, oikumene dan kerjasama antar agama, pola pekabaran Injil masa kini, peran serta gereja dalam pembangunan masyarakat, ketahanan nasional serta masalah pluralitas dan tantangan yang dihadapi di Indonesia masa kini.

Pembinaan kepada warga gereja non fungsionaris diarahkan pada pembentukan kader gereja yang dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan Tri Darma Gereja lewat kategori-kategori warga jemaat seperti; Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persatuan Kaum Perempuan dan Persekutuan Kaum Bapak. Walaupun nama atau sebutan berbeda, umumnya pembagian kategori berdasarkan usia warga jemaat maupun status perkawinannya relatif sama antar gereja. Di beberapa gereja tertentu bahkan mempunyai kelompok persekutuan lanjut usia (PKLU) yang sangat aktif, termasuk kelompok-kelompok profesi seperti Ikatan Dokter Kristen, persatuan advokat Kristen, Persatuan Guru Kristen, persatuan karyawan/pekerja Kristen dan berbagai kelompok fungsional profesional gerejawi lainnya.

**6. Proses Perjalanan Seorang Calon Pemimpin Umat (Pengalaman GPIB)**

Untuk menjadi seorang pemimpin umat atau gereja yang biasa disebut Pendeta atau Gembala Jemaat maka –paling tidak- menurut praktek yang dijalankan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) saat ini adalah mengikuti pola atau perjalanan sebagai berikut:

1. **Panggilan dan Pengutusan**

Berdasarkan Pemahaman Iman GPIB, panggilan dan pengutusan seseorang dalam tugas kepejabatan gerejawi (pendeta/pelayan Firman dan Sakramen, diaken, penatua, maupun para pengurus/pelayan unit-unit missioner dimaknai sebagai;

* Allah yang memanggil, memilih, membentuk dan menghimpun umat Israel
* Umat Israel gagal dalam ketaatan kepada Allah, tapi Allah tidak pernah gagal dalam rencana-Nya
* Melalui Yesus Kristus, pekerjaan penyelamatan Allah dilanjutkan
* Gereja (GPIB) memahami bahwa panggilan Allah kepada seseorang terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu panggilan bathin dan panggilan institusional

Panggilan bathin merupakan kesadaran yang timbul akibat imannya kepada Tuhan untuk melaksanakan misi Kristus di dunia ini.Selanjutnya, panggilan institusional (kelembagaan) yaitukesadaran akan panggilan bathin tersebut dijalani seseorang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga gereja.

Ada berbagai cara Tuhan Allah memanggil dan mengutus seseorang untuk memberitakan Firman-Nya, baik dengan suara-Nya langsung, melalui para malaikat, melalui mimpi, penglihatan, pemanggilan langsung (para Rasul dalam PB), melalui pemilihan/penunjukkan termasuk panggilan bathin. Dalam kaitan dengan panggilan dan pengutusan dimaksud maka Tuhan Allah selalu bertindak sesuai dengan maksud, rencana dan firmanNya sendiri dan Ia sudi memperkenalkan isi maksud, rencana dan firman itu kepada umat-Nya. Oleh karena itu, TUHAN Allah mengutus orang-orang tertentu menurut pilihan-Nya, baik pria maupun wanita, sebagai pengantar firman-Nya untuk menyadarkan umat-Nya akan maksud dan perbuatan-Nya.Peristiwa Allah “memanggil dan mengutus” orang-orang tertentu memper-lihatkan suatu perbuatan besar dari Allah sebagai anugerah dan kasih karuniaNya.Pada gilirannya, atas panggilan dan pengutusan itu, Allah menghendaki agar orang-orang yang dipanggil dan diutus itu merelakan dirinya sebagai utusan Tuhan termasuk ketika mereka mengalami penderitaan atau kesulitan-kesulitan dari pemanggilan dan pengutusannya itu.

Seorang Vikaris GPIB pada hakekatnya, mengalami suatu panggilan bathin dari Tuhan Allah yang kemudian ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan dalam cita-citanya ketika masih berada pada pendidikan formal di SD s/d SLTA. Mungkin juga panggilan itu kemudian diteruskan dalam bentuk pergumulan pribadi dan keluarga sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk memilih Pendidikan Tinggi Teologia sebagai wadah tempat ia digodok sebagai calon teolog. Mengapa Teologia karena menurut ketentuan institusional (gereja), untuk menjadi Pendeta/Pelayan Firman dan Sakramen maka seyogianya seseorang harus dinyatakan lulus dari kategori dan jenjang pendidikan dimaksud. Dengan demikian, seorang Vikaris GPIB haruslah merupakan lulusan sarjana dari PT Teologia yang direkomendasikan oleh GPIB.

1. **Proses Perekrutan Seorang Vikaris GPIB**

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) sesuai dengan dinamikanya telah berkali-kali melaksanakan proses perekrutan vikaris. Setiap masa kerja Majelis Sinode memiliki cara tersendiri yang tentunya tidak keluar dari ketentuan pilar-pilar GPIB. Ada masa di mana seorang Vikaris langsung diutus gereja langsung sebagai “pembantu” pendeta yang bisa langsung mengadakan berbagai tugas kependetaan sampai kepada pembinaan warga jemaat.Hal ini dapat dimaklumi di satu pihak karena kekurangan tenaga pendeta dan -yang lebih penting- bobot pendidikan teologia pada waktu itu dirancang sedemikian rupa sehingga pada tingkatan setara SLTA atau D-1, lulusannya sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tugas-tugas demikian.

Namun seiring dengan perkembangan IPTEKS yang dianut dalam berbagai kurikulum pendidikan formal termasuk pendidikan teologia maka ada semacam “percepatan” dan “perbanyakan” lulusan yang suka atau tidak, diakui atau tidak, mengalami “degradasi kualitas”. Ini terjadi di semua disiplin ilmu. Ada semacam hipotesis bahwa sarjana lulusan sampai dengan awal tahun 80-an jauh lebih “baik” dari periode sesudah itu.Tentu hipotesis ini harus diuji, namun kalau terbukti “ya” maka harus ada tindak lanjut perbaikan dan peningkatan mutu melalui pembinaan. Khusus mengenai program vikariat di GPIB sampai dengan tahun 1980-an *–ini menurut ceritra para pendeta senior di GPIB-* para vikaris itu seakan “terjun bebas” ke lapangan tanpa proses persiapan diri yang dilakukan seperti belakangan ini. Mereka yang benar-benar “terpanggil” dan menjalani tugasnya dengan baik, pada akhirnya diteguhkan sebagai Pendeta/PFS sekaligus diangkat sebagai pegawai GPIB.

Proses berjalan terus sampai dengan era tahun 90an.Proses vikariat yang tadinya dijalani selama 1 (satu) tahun kemudian menjadi 2 (dua) tahun dan berlangsung di dua jemaat latihan. Buku panduan pelaksanaan vikariat pun pada akhirnya tersedia. Pola perekrutan mentor dan vikaris pun berjalan sesuai dengan tatanan yang dianut Majelis Sinode periode berjalan. Bahkan di awal-awal ada 2 mentor bagi seorang Vikaris di suatu wilayah, namun tidak dilengkapi dengan pola kerja mentor yang memadai sehingga seringkali terjadi benturan kepentingan. Proses penyiapan mentor dilaksanakan terpisah dan sangat bergantung pada kedekatan wilayah kerja pendeta dengan kantor MS GPIB. Akhirnya, banyak sekali pendeta senior yang tidak pernah menjadi mentor karena tidak memiliki sertifikat mentor. Di lain pihak, ada pendeta yang tidak pernah keluar tugas dari Jakarta tetapi bisa menjadi mentor walau baru menjadi Pendeta/PFS sekitar 5 tahun. Proses vikariat tahun II selalu dikatakan kelanjutan dari vikariat tahun I, tetapi tidak pernah jelas “start” dari mana dan mau ke mana? Ini menjadi masalah yang harus dipecahkan ketika MS GPIB XVIII (2005-2010) memulai masa kerjanya.

Konsep perekrutan vikaris GPIB “diluncurkan” dan mengalami resistensi yang sangat kuat. Pola mentoring yang cenderung membuat vikaris sebagai “ban serep” dihapuskan, materi latihan vikaris secara detail dan hirarkhis selama 2 tahun diajukan, tetapi yang paling mencengangkan adalah ditolaknya IPK lulusan PT Teologia yang minimal harus 2,75. Proses studi dan proses belajar juga adalah bagian dari iman dan hasilnya merupakan persembahan yan berharga bagi bangsa negara dan juga gereja. Gereja mengajarkan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, namun di lain pihak ada “pengecualian” bagi syarat calon pendeta. Jika untuk pekerjaan duniawi saja diminta IPK minimal 3,0 ditambah keterampilan Bahasa Inggris dan Komputer, maka sangat menyedihkan bagi GPIB tercinta, “asal lulus” sekalipun “dipaksakan” diterima.Ini harus jadi kajian Majelis Sinode, apakah resistensi itu karena ada hubungan keluarga, atau titipan, atau apapun bentuk hubungan kolusif dan nepotisme. Jangan kemudian atas nama “panggilan” lalu maknanya diputar-balikkan untuk meloloskan kepentingan kolusi dan nepotisme dimaksud.

Di manapun di dunia ini, ketika menyangkut persyaratan kepegawaian maka seseorang hari menjalani tes psikologi maupun tes kesehatan.Hasil tes inipun masih dipersoalkan.Seorang Pendeta GPIB adalah sekaligus pegawai GPIB.Pola yang dianut sampai saat ini adalah pola PNS tapi belum diikuti sebagaimana mestinya.Untuk itu diperlukan suatu terobosan baru yang lebih bersifat jangka panjang.Perguruan Tinggi Teologi harus menjadi sebuah jenjang pendidikan formil yang elit.Masuknya harus diseleksi secara ketat dalam jumlah terbatas seperti pola akademi TNI maupun Polri atau kembali ke Pola Seminari Katolik.Gereja lewat jemaatnya, menyeleksi calon mahasiswa PT Teologia secara ketat (pakai lembaga khusus untuk recruitment), jemaat kelas mampu diberi tugas membiayai sekolahnya, kemudian pengawasan turut dilakukan oleh jemaat yang membiayai.Ini sekaligus untuk menghindari Sekolah Teologia pasang iklan sana-sini karena kekurangan calon mahasiswa yang juga merupakan “satu-satunya” sumber pembiayaan mereka.

Jemaat memilih dan mempersiapkan calon, membiayai dan mengawasinya. Majelis Sinode ikut menentukan kurikulum (sebagai pengguna output PT) dalam bentuk masukan kriteria lulusan yang diinginkan). Sekolah Teologia, dalam kaitan dengan “pasar” tenaga kerja menyesuaikan diri dengan permintaan “pasar” sesuai tuntutan ruang dan waktu. Selanjutnya gereja bertugas untuk melaksanakan proses pemendetaan (perupaan pendeta). Kalau kerja model ini dijalani, maka tidak ada lagi persoalan IPK, Psychotest and Health Test. ***SUATU IMPIAN !***

1. **Proses Vikariat dan Mekanisme Evaluasinya**

Sampai saat ini, GPIB masih menjalankan proses pembinaan vikaris dengan pola sebagai berikut: Setelah melalui pemenuhan ketentuan institusional (administratif, akademik, kesehatan dan psikologi) maka calon vikaris akan memasuki masa Pravikariat. Dari suatu pendidikan teologi yang bersifat oikumenis maka si calon vikaris mulai digiring dengan menggunakan pendekatan piramida terbalik. Pengetahuan teologi dan gereja yang luas akan dikerucutkan sampai ke ujung bawah yang berupa Pemahaman Iman GPIB. Tidak ada di luar itu!

Calon vikaris dalam masa vikariat ini –sekalipun mereka berasal dari warga GPIB- harus kembali dibekali dengan Organisasi dan Tata Kerja GPIB. Mengapa demikian? GPIB sebagai gerejalah yang akan melaksanakan proses perupaan pendeta. Untuk itu mereka harus mengenal dan memahami secara baik mekanisme kerja GPIB yang didasarkan kepada Tiga Pilar GPIB yang ada. Kalau tadi mereka adalah warga GPIB “tradisional” maka sekarang mereka dalam proses –untuk kelak- menjadi warga GPIB “formal” yang akan menjalankan ketentuan itu di dalam jemaat dan gereja. Jangan sampai ketika sudah menjadi Ketua MJ malah berbenturan dengan para presbiter lain hanya karena pengetahuan yang terbatas tentang mekanisme ber GPIB. Ini fakta yang tidak bisa disangkali masih terjadi di GPIB. Kalau ini diabaikan maka akan terjadi KMJ pola “cari aman” yaitu memilih kompromi dengan MJ asala tidak diutak-atik kepentingannya. Atau untuk menutup “kekurangan” menjadi “otoriter” dengan bersembunyi di belakang ayat-ayat Alkitab.Selanjutnya, pengenalan tentang masa Vikariat I, unsur-unsur yang dipelajari selama tahun I, indikator penilaian dan topik-topik khusus.Sebelum ditempat di jemaat latihan I maka calon vikaris sebaiknya telah mulai mengenal jemaat bersangkutan lewat data sekunder yang tersedia di Kantor MS, termasuk pengetahuan mengenai tema-tema sinodal tahun berjalan, rencana kerja tahunan GPIB, dsb.

Masa Pravikariat ditutup dengan penetapan calon-calon vikaris sebagai Vikaris dan sekaligus penentuan mentor dan jemaat latihan I. Untuk hal ini, harus hanya dilakukan oleh Majelis Sinode dan bukan oleh Panitia atau fasilitator yang ditugaskan. Jangan sampai terjadi fasilitator atau panitia pelaksana mengambil alih tuanggung jawab MS dalam penentuan mentor dan penempatannya. Ini adalah kesalahan fatal jika dibiarkan.

Sekali lagi, masa vikariat itu adalah masa di mana seorang vikaris dipersiapkan oleh gereja terutama melalui mentornya untuk menjadi seorang Pelayan Firman dan Sakramen.Dari suatu lembaga studi teologia oikumenis, dia harus masus untuk berpikir, bertindak dan berperilaku GPIB.Piramida terbalik lagi. Maka vikaris tahun pertama akan memulai tugas awalnya dengan magang terhadap mentornya. Untuk beberapa saat vikaris hanya mengikuti untuk mengenal dan mempelajari apa yang dilakukan mentor di jemaat. Dari situ ia mengevaluasi dirinya dan mentor mengevaluasinya dengan indikator-indikator yang telah disediakan. Bobot persentase point ini ditentukan dalam evaluasi vikaris nantinya. Berapa persen dari point 1, berapa dari point 2 dst untuk kemudian menjadi nilai 100 %.Materi selanjutnya berhubungan dengan kehadirannya nanti sebagai pejabat gereja maka ia harus memahami secara utuh apa yang dikenal dengan Tiga Pilar GPIB yang meliputi; Pemahaman Iman GPIB, Tata Gereja GPIB dan PKUPPG.Ini harus diselesaikan dalam Triwulan I.

Selanjutnya, selama Triwulan II, vikaris diarahkan untuk memahami administrasi perkantoran di jemaat mulai terlibat dalam rapat-rapat seperti SMJ, rapat PHMJ tertentu, rapat-rapat koordinasi sekalipun hanya sebagai pemimpin ibadah dan pendengar. Hal ini penting karena kelak ia adalah pemimpin dari dari berbagai aspek dimaksud. Memasuki Triwulan III, vikariat tahun I diarahkan kepada tugas dalam bidang pelayanan teologis. Pada periode ini vikaris akan diberi masukan tentang sejarah GPIB, sejarah jemaat dan mulai memimpin berbagai ibadah yang didampingin dan dinilai oleh mentor. Tugas-tugas lain seperti mengajar PA/PT, mendampingi GP serta pengajaran katekisasi dilakukan dalam koordinasi dan pendampingan oleh mentor.Triwulan ke IV, seorang Vikaris sudah harus terlibat dalam penyusunan RK dan RAB di jemaat.Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi seorang vikaris untuk mempelajarinya dengan baik. Refleksi maupun evaluasi dari mentor tentang topik ini sangat penting dilakukan seorang mentor.

Tugas akhir tahun pertama umumnya berupa laporan yang komprehensif tentang perjalanan vikariat di jemaat selama 1 tahun dan ditambah dengan topik khusus yang ditentukan oleh Majaleis Sinode.Topik khusus ditentukan oleh Majelis Sinode, terutama yang berkaitan dengan hal-hal penting yang terjadi di dalam GPIB atau jemaat. Misalnya proses pemilihan Pnt-Dkn, pelembagaan jemaat, penanganan pos Pelkes, pengajaran katekisasi, dsb. Ketua MS yang membidangi hal ini perlu melakukan tindakan proaktif untuk mengusulkan topik-topik khusus yang berguna bagi pengembangan GPIB ke depan.

Pola evaluasi dilakukan dengan cara pertama, Vikaris mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian mentor mengevaluasi dan menilai vikaris. Masing-masing penilaian dikirim secara rahasia kepada MS cq Ketua yang menanganinya. Jika proses evaluasi diri dilakukan secara jujur dan penilaian mentor juga obyektif maka nilai yang dari Vikaris dan Mentor cenderung sama.Bila terjadi perbedaan yang signifikan maka MS perlu berkomunikasi dengan kedua belah pihak untuk mendapat berbagai masukan dan upaya perbaikan. Perbedaan-perbedaan ini juga akan menjadi penting dalam evaluasi vikaris yang dilakukan secara komprehensif dan per kelompok. Pemahaman evaluasi ini sangat penting bagi vikaris maupun mentor sehingga pada gilirannya, MS akan menetapkan kelanjutan proses berikut. Sebaiknya, dalam rangka evaluasi maka dilakukan evaluasi awal oleh MS untuk kemudian diserahkan kepada Tim evaluator yang terdiri dari mentor dan calon mentor yang disilang.Evaluasi oleh MS, hanya oleh pendeta, sebab hanya pendeta yang lebih memahami tugas kependetaan, bukan Pnt/Dkn yang bertugas sebagai fungsionaris MS.

Setelah Vikaris tahun I dinyatakan lulus maka mereka kemudian ditentukan jemaat latihan ke II bersama mentornya oleh Majelis Sinode, bukan oleh Panitia. Pola pelaksanaan pada tahun kedua persis sama dengan tahun I. Yang membedakan adalah materinya. Triwulan I, dimulai dengan penyiapan materi memimpin ibadah, termasuk ibadah-ibadah bagi Pelkat dan materi ajar katekisasi.Triwulan ke II kembali berhubungan dengan administrasi di jemaat tetapi lebih ditekankan kepada RK & RAB serta pola evaluasinya.Di samping itu vikaris mempelajari atau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pastoral dari mentornya.Triwulan III seorang vikaris tahun II sudah leih banyak diarahkan kepada pembentukan jatidiri sebagai seorang calon pendeta / pelayan firman dan sakramen.Vikaris harus selalu mengikuti mentornya dalam tugas ibadah khusus seperti perjamuan kudus, baptisan, pernikahan, pemakaman, dsb.Doktrin gereja dan gereja missioner harus dipahami dengan baik.Triwulan IV diarahkan kepada evaluasi diri menjelang peneguhan sebagai PFS dan sekaligus mempersiapkan pelaporan akhir untuk tahun ke dua dengan topik khusus dari MS GPIB.Sekali lagi GPIB di dalam perjalanan dan pergumulannya pasti selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan.MS GPIB dapat mengangkat hal ini bagi pelaporan Vikariat, namun harus ditentukan sejak awal masa vikariat tahun berjalan.

1. **Kontribusi jemaat (lessons learnt)**

Sekolah Tinggi Teologi atau Fakultas Teologia dari suatu Universitas mempersiapkan sumberdaya insani “teolog”, selanjutnya gereja melaksanakan proses “perupaan pendeta”-dalam istilah GPIB-sebagai Pelayan Firman dan Sakramen. Gereja lewat Majelis Sinode mengutus para vikaris ke dalam jemaat-jemaat latihan untuk memperlengkapi dirinya sehingga secara tidak langsung, jemaat ikut bertanggung jawab dalam proses mempersiapkan seorang hamba Allah untuk menjadi pendeta/pegawai GPIB. Dalam konteks tanggung jawab itulah maka jemaat memberikan tumpangan atau tempat tinggal beserta “sekedar bantuan biaya hidup”, selama masa vikariat. Panggilan bathin dan panggilan institusional hamper rampung. Sang vikaris “belajar” dari jemaat di bawah pendampingan dan bimbingan mentornya.

Dalam kesehariannya, mentor dan vikaris adalah “mitra kerja” dalam menjalankan misi gereja. Namun dalam hubungan kemitraan itu, vikaris haruslah tetap menjadi “junior” yang belajar dari pengalaman sang “senior”. Mentor pada gilirannya akan menjadi bangga untuk mempersembahkan kepada gereja, seorang hamba Allah yang mungkin memiliki banyak kelebihan dari dirinya sendiri. Vikaris belajar dari para anggota PHMJ, belajar dari para Penatua dan Diaken, belajar dari para fungsionaris pelayanan kategorial, belajar dari pegawai kantor, bahkan dalam sosialisasinya di dalam jemaat latihan, iapun belajar banyak hal dari jemaat. Suatu proses belajar mengajar yang baik pasti terjadi ketika ada hubungan yang harmonis antara jemaat dengan vikarisnya.

Menjelang akhir dari proses vikariat tahun ke II, ada senyuman dan harapan dari sang vikaris untuk segera mendapatkan panggilan institusional yang lengkap agar ia bisa segera diutus ke tengah-tengah jemaat dalam suatu predikat baru –sebagai pendeta/pelayan Firman dan Sakramen-. Itulah harapan dari berbagai pihak; dari sang vikaris, dari mentor, MS, bahkan dari keluarga dan jemaat. Sapaan vikaris masih beberapa hari lagi dan akan berubah menjadi “pendeta” lewat ibadah peneguhan yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode. Mentor bangga, jemaat bangga.Inilah “persembahan” kami kepada-Mu Tuhan. Dalam diri sang pendeta muda, ada kontribusi kami. Mungkin sedikit, tapi lewat kontribusi itulah kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Mentor dan Jemaatnya akan tersenyum menyambut pengutusan MS GPIB bagi sang Pendeta baru menuju ladang pengusahaan yang baru. Di tempat yang baru, dengan segala bekal yang diperoleh dari jemaat I dan II lewat para mentornya maka Sang Pendeta akan memulai tugasnya yang baru.

Ingatlah bahwa momentum peneguhan sebagai Pendeta/Pelayan Firman dan Sakramen adalah ***“hanya pengakuan awal”*** bahwa yang bersangkutan telah sah dan layak untuk melaksanakan panggilan bathin dan panggilan institusional secara utuh. Dalam rangka meneruskan misi Kristus di dunia ini, sang pendeta baru masih terus membutuhkan penyertaan Roh Kudus untuk terus membentuk dirinya menjadi seorang hamba Allah yang setia sampai akhir hayatnya. Suka dan duka mungkin akan datang silih berganti namun Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja berkata:

***“Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." (Kis. 9:15-16)***

7. Kata-kata Akhir

Masa depan gereja akan sangat tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan warga sekaligus calon pemimpin umatnya. Jika dilakukan dalam suatu pola atau mekanisme yang teratur dan tertib maka pada gilirannya akan menghasilakan “gereja yang bertumbuh dalam ketertiban dan keteraturan dan yang senantiasa memperbaharui dirinya.

**RUJUKAN PUSTAKA:**

FoEh, John E.H.J. , 2008. Catatan Singkat Untuk Memahami Pilar-pilar GPIB. dalam Buku 60 Tahun GPIB (1948-1998). Bab II, Artikel ke 12.

FoEh, John E.H.J., M. Raintung, H.B.Dj. Jacob dan M.B. Wahyono, 2008. GPIB 60 tahun (1948-1998). Membangun masa depan dengan tulus, jujur dan damai. Tim KerjaBuku Peringatan 60 Tahun GPIB, Jl. Medan Merdeka Timur No. 10, Jakarta Pusat.

GPIB, 2010. Tata Gereja Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jl. Medan Merdeka Timur No. 10 Jakarta.

GPIB, 2005. Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja 2006-2026 GPIB. Buku Hasil Persidangan Sinode GPIB, XVIII.

Greene, Albert. E., 2010. Reclaiming The Future of Christian Education. Covenant Christian Education, Bellevue, USA.

Riemer, G. 1998. Ajarlah Mereka – Kualitas Umat Kristiani Esok Ditentukan Oleh Pembinaan Kini. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF

Singgih, E. Gerrit, 1997. Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja MenyongsongAbad21, Kanisius.

Sularso Sopater, ed., 1998. Seri Membangun Bangsa; Kepemimpinan dan Pembinaan Warga Gereja. Jakarta: Sinar Harapan.

1. Orasi Ilmiah pada Dies Natalis dan Wisuda Sarjana - Pascasarjana STT Intim, Makassar, 20 September 2013. [↑](#footnote-ref-2)
2. Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Alam, Universitas Pelita Harapan, Jakarta serta Ketua I BP Yayasan STT Intim Makassar [↑](#footnote-ref-3)